



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 066 – 887 – 2021**

**TENTANG**

**HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. nomenklatur jabatan, tugas jabatan, kualifikasi pendidikan minimal dan jumlah kebutuhan pegawai masing-masing jabatan; dan
  - b. peta Jabatan.
- KETIGA : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA merupakan pedoman dalam penataan Aparatur Sipil Negara pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Peta Jabatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang termuat dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065 – 899 – 2018 tentang Peta Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065 – 838 – 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065 – 899 – 2018 tentang Peta Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,  
pada tanggal 18 November 2021  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumatera Barat;
2. Sdr. Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 066 – 887 - 2021

TANGGAL : 18 November 2021

TENTANG : HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
1.	Kepala Badan Penghubung	Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penghubung	S-1/D-4 bidang Sosial/ Politik/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, kepegawaian, kerjasama dan kehumasan, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan dan dokumentasi serta pengelolaan keuangan badan agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana	S-1/D-4 bidang Ekonomi/ Akuntansi/ Ekonomi Pembangunan/ Ilmu Komunikasi/ Manajemen/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Hukum/ Manajemen Informatika/ Sistem Informasi/ Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
3.	Kepala Seksi Humas, Protokol dan Pelayanan	Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Humas, Protokol dan Pelayanan agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana	S-1/D-4 bidang Ilmu Komunikasi/ Sosial/ Politik/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
4.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	Mengendalikan pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana	S-1/D-4 bidang Ilmu Komunikasi/ Sosial/ Politik/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
5.	Kepala Seksi Promosi dan Investasi	Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Promosi dan investasi agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana	S-1/D-4 bidang Ilmu Komunikasi/ Sosial/ Politik/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
6.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang sumber daya manusia aparatur	S-1/D-4 bidang Manajemen/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
7.	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Melakukan kegiatan penyusunan dan penelaahan data obyek kerja di bidang program anggaran dan pelaporan	S-1/D-4 bidang Ekonomi pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
8.	Penyusun Laporan Keuangan	Melakukan kegiatan penyusunan dan penelaahan data obyek kerja di bidang laporan keuangan	S-1/D-4 bidang Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
9.	Bendahara	Melakukan kegiatan penerimaan, pengeluaran	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/	1

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
		dan pembukuan terkait transaksi keuangan	manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	
10.	Verifikator Keuangan	Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencaian anggaran	D-3 bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
11.	Pengelola Gaji	Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang gaji	D-3 bidang Akuntansi/ Manajemen/Administrasi Niaga atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
12.	Pengelola Keuangan	Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang keuangan	D-3 bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi Niaga/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
13.	Pengelola Teknologi Informasi	Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang teknologi informasi	D-3 bidang Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Telekomunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
14.	Sekretaris	Melakukan kegiatan penyiapan bahan dan pengaturan jadwal pimpinan	D-3 bidang Sekretaris/ Administrasi/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
15.	Pengolah Data	Melakukan kegiatan pengolahan dan pendokumentasian serta penginputan data	D-3 bidang Teknik Informatika/ Manajemen Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan	1
16.	Pengelola Barang Milik Negara	Melakukan kegiatan pengelolaan dan	D-3 bidang Akuntansi/ Manajemen/	1

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
		penyusunan laporan di bidang barang persediaan dan barang milik negara	Administrasi Negara/ Administrasi Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	
17.	Pranata Kearsipan	Melakukan kegiatan pengolahan, pelayanan dan evaluasi hasil kerja di bidang kearsipan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Kearsipan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
18.	Pengelola Asrama	Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang asrama	D-3 bidang Teknik Informatika/ Manajemen Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan	3
19.	Pengelola Kendaraan	Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang kendaraan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin/ Manajemen/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
20.	Pengadministrasi Keuangan	Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di bidang Keuangan	SLTA	1
21.	Pengadministrasi Persuratan	Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian surat	SLTA	1
22.	Pengadministrasi Umum	Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum	SLTA	4
23.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di bidang sarana dan prasarana	SLTA	3

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
24.	Pengemudi VIP	Melakukan kegiatan pemeriksaan dan pelayanan transportasi pejabat negara atau vip dengan kendaraan dinas.	SLTA	4
25.	Pengemudi	Melakukan kegiatan pemeriksaan dan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.	SLTA	10
26.	Penata Liputan	Melakukan kegiatan pengelolaan dan penataan bahan liputan serta penyusunan laporan di bidang peliputan	D-3 Hubungan Masyarakat ( <i>broadcasting</i> ) atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2
27.	Pengolah Informasi Media	Melakukan kegiatan pengolahan informasi media cetak dan televisi	D-3 Jurnalistik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
28.	Petugas Protokol	Melakukan kegiatan keprotokolan pada instansi pemerintah	D-3 Manajemen/ Administrasi Niaga atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6
29.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang hubungan antar lembaga	S-1/D-4 bidang Politik/ Pemerintahan/ Administrasi Negara/Administrasi Publik/ Hukum/ Psikologi Masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2
30.	Pengolah Data Kelembagaan	Melakukan kegiatan pendokumentasian dan pengolahan di bidang data kelembagaan	D-3 bidang Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Administrasi Perkantoran/ Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
31.	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang administrasi pemerintahan	D-3 bidang Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi Niaga/ atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
32.	Penata Pameran	Melakukan kegiatan penataan benda koleksi dan desain layout tata pameran untuk kerapihan dan kelancaran pameran	SLTA	2
33.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Melakukan kegiatan penyusunan dan penelaahan data obyek kerja di bidang bahan	S-1 / D-4 bidang Komunikasi/ Desain Komunikasi Visual atau bidang lain yang	1



NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
		informasi, kebijakan, dan publikasi	relevan dengan tugas jabatan	
34.	Pengelola Promosi dan Informasi Pariwisata	Melakukan kegiatan pengelolaan promosi dan informasi wisata di bidang pariwisata	D-3 bidang Manajemen Pariwisata/Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4
35.	Pengelola Perpustakaan	Melakukan kegiatan pengelolaan di bidang perpustakaan	D-3 bidang Perpustakaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
36.	Pengelola Retribusi Daerah	Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang retribusi daerah	D-3 bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi Niaga/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
37.	Pranata Acara	Melakukan kegiatan perancangan, penyiapan, penyusunan dan publikasi berbagai acara pemerintahan	D-3 bidang Administrasi Niaga/ Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
38.	Pranata Fotografi	Melakukan kegiatan penataan, pengklasifikasian, dan penelaahan di bidang fotografi	D-3 bidang Jurnalistik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
39.	Pranata Promosi	Melakukan kegiatan pengelolaan pelaksanaan promosi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk suksesnya penyelenggaraan promosi	D-3 bidang Manajemen/ Administrasi Niaga atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

PETA JABATAN BADAN PENGHUBUNG  
 PROVINSI SUMATERA BARAT



